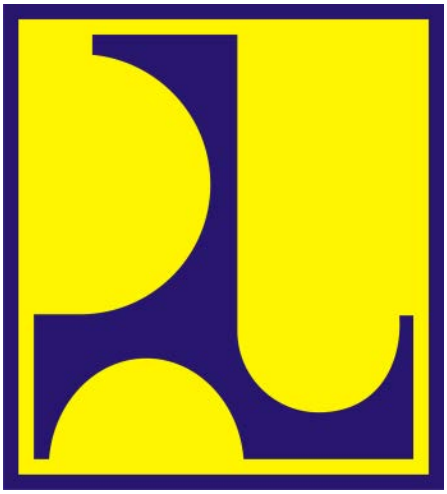
BAB II

TINJAUAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas merupakan lembaga teknis dan non teknis yang tugas pokoknya disesuikan dengan fungsinya yang disahkan oleh PERDA (Peraturan Daerah). Salah satu contoh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat mempunyai 5 Bidang dalam satu badan pengkajian (BPMKL).

Untuk mengetahui kini beberapa sejarah singkat mengenai PU atau Pekerjaan. Istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *"Openbare Warken"* yang pada zaman belanda disebut *"Waterstaat Werken"*. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep V&W) yang sebelumnya terderi dari 2 Dept. Van Gouvernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgerlijke Openbare Werken.



Gbr II.1 Logo Kementrian Pekerjaan Umum

2.2 Profil Perusahaan

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan ang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 061/01/Org tentang Singkatan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Guburnur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.1301-A/Peg.2008,

Maka Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) merupakan unsur dinas ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (DISTAKIM) Provinsi Jawa Barat.



Gbr II.2 Logo Provinsi Jawa Barat

2.2.1 Visi dan Misi :

"*DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN*"

Penjelasan :

- **Pelayanan Prima :** Dinas Permukiman mengutamakan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD bidang permukiman dan perumahan.
- **Andalan :** Dinas Permukiman dan Perumahan menjadi OPD utama dan unggulan dalam mewujudkan permukiman dam perumahan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan.
- **Produktif :** Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian
- **Harmonis :** Mendorong harmonisasi antar wilayah dan antar sector, antar jenjang, antar daerah dan antar pelaku pembangunan.
- **Berkelanjutan :** Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana mengacu pada tata ruang dan bidaya lokal.

2.2.2 Misi Dinas Permukiman dan Perumahan :

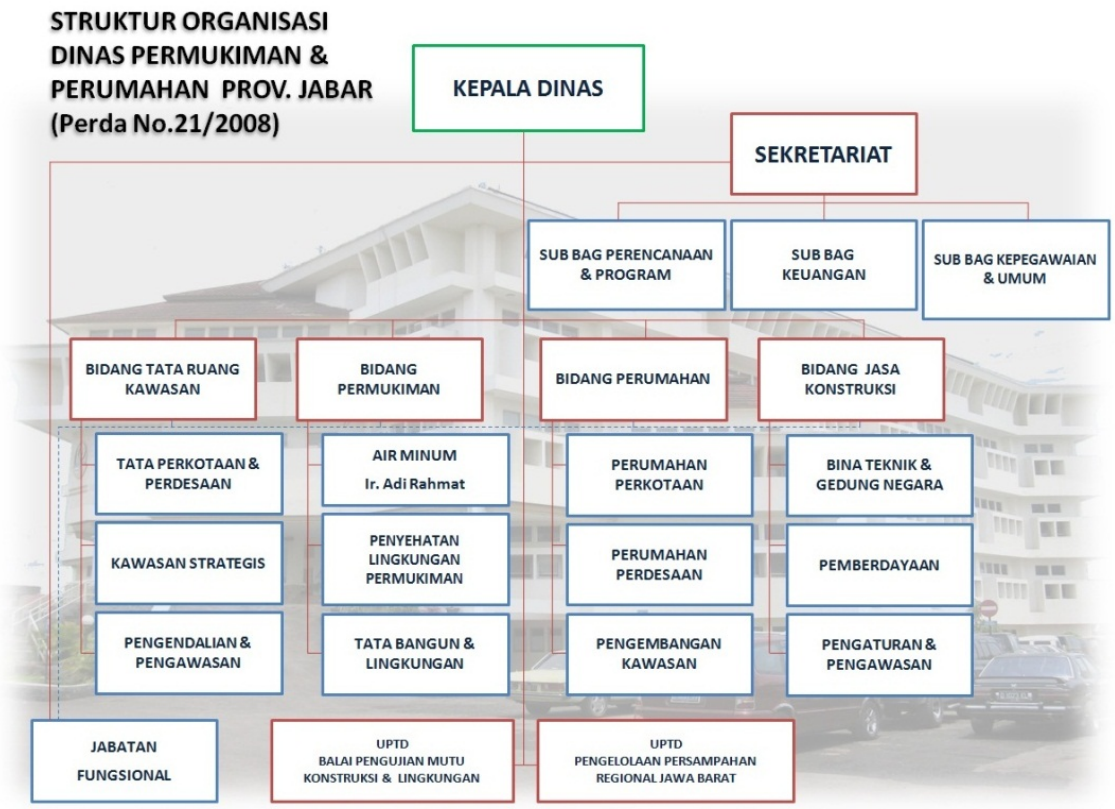
1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif.
2. Meningkatkan ketersedian dan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
3. Meningkatkan fasilitasi ketersedian dan kualitas perumahan yang terjangka.

4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelengaraan jasa konstruksi dan peningkatan uji mutu.
5. Meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerinttah berbasis pemberdayaa, kemitraan dan kemandirian.

2.2.3 Dasar Hukum :

1. UU No. 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
2. Perda No. 15/2000, Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Perda No. 5/2002, Perubahan Perrda No. 15/2000
4. SK Gubernur No. 47/2001, Tupoksi dan Rincian Tugas Unit Distarkim.
5. SK Gubernur No. 59/2022, Tupoksi dan Rincian Tuas UPTD Distarkim (BPMKL)
6. Pergub tentang Perubahan dari Distarkim menjadi Diskimrum
7. Pergub Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2009 Tupoksi dan Rincian Tugas Unit Diskimrum.
8. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
9. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2001, tentang Penyelengaraan Dekonsentrasi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2001, tentang Penyusunan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.4Struktur Organisasi



Tabel II.2 Struktur Organiasasi